

Peran Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif

Maharani Safitri

Universitas Bina Sarana Informatika

Sonny Fransisco Siboro

Universitas Bina Sarana Informatika

Amara Kasih Ariningrum

Universitas Bina Sarana Informatika

Muhammad Arul Andreandra

Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl.Margonda No.8,Pondok Cina,Kecamatan Beji,Kota Depok,Jawa Barat 16424

Korespondensi Penulis: mranisfr@email.com

Abstract

This research aims to thoroughly examine how accounting is viewed and applied in the regional financial framework. This type of research uses a literature study in the form of a qualitative approach. The results of this study indicate that the effective application of AKD in accordance with SAP is the key to realizing open, accountable, and sustainable regional financial management.

Keywords: *Regional Financial Framework; Government Accounting Standards; Regional Financial Management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana akuntansi dipandang dan diterapkan dalam kerangka kerja keuangan daerah. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur berbentuk pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AKD yang efektif sesuai dengan SAP merupakan kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kerangka Kerja Keuangan Daerah; Standar Akuntansi Pemerintahan; Pengelolaan Keuangan Daerah.

LATAR BELAKANG

Beberapa pihak yang memiliki kepentingan saling berbeda memiliki ketergantungan terhadap informasi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Untuk memastikan transparansi pelaporan, bukti administratif yang dapat dipercaya publik harus menyertai pelaporan keuangan pemerintah (Fauziyah, 2017).

Perusahaan atau instansi yang mempraktikkan pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan hal ini dapat menjadi tanda kinerja yang memuaskan (Munzir, Munzir et al., 2022). Dalam mencapai tujuan akuntansi keuangan

daerah yang optimal, harus ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebab menyelaraskan berbagai ketentuan yang berlaku di kedua lembaga tersebut dapat menjadi sulit dalam pelaksanaannya.

Dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terdapat tuntutan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah untuk mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan (Purba & Amrul, 2017). Antara akuntabilitas dan aksesibilitas memiliki keterkaitan untuk memastikan bahwa individu atau organisasi menerima pertanggungjawaban atas perbuatan dan pilihan mereka, dan memberikan penjelasan yang transparan dan dapat dimengerti kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Salah satu komponen penting dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal adalah manajemen keuangan yang baik. Pencatatan, pelaporan, dan pengendalian sumber daya keuangan merupakan bagian dari proses manajemen keuangan daerah, yang sangat terbantu dengan adanya akuntansi. Terlepas dari banyaknya penelitian mengenai praktik akuntansi dalam konteks keuangan daerah, metode kualitatif masih dapat digunakan untuk mengembangkan pemahaman lebih lanjut mengenai fungsi akuntansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara menyeluruh bagaimana akuntansi di pandang dan diterapkan dalam kerangka kerja keuangan daerah. Dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan standar akuntansi yang relevan, pemahaman yang lebih memadai atas fungsi akuntansi dalam keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah dan efektivitas manajemen keuangan publik.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Pembahasan	Hasil Penelitian
1	Jauhari, Hadi, dan Suhairi Hazisma	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi	Mengkaji dampak dari sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah memiliki dampak positif

		Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.	sebagai elemen penting yang harus diperhitungkan ketika membuat laporan keuangan daerah.	yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, sistem pengendalian internal pemerintah tidak berperan sebagai pemoderasi hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.
2	Wulandari, Nur Dwi.	Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor kecamatan Kota Medan.	Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan dipengaruhi oleh penggunaan metode akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian.	Akuntabilitas keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan dan Kantor Kelurahan Kota Medan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, keterbukaan informasi publik, dan tindakan pengendalian secara bersamaan.
3	Pratama, R.	Implementasi Akuntansi Keuangan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk	Masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kabupaten X dalam

		Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten X.	mengetahui seberapa tepat dan efektif penerapan akuntansi keuangan daerah dalam rangka memberikan informasi keuangan yang akurat dan transparan.	menerapkan akuntansi keuangan daerah, terutama dalam hal koordinasi peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Proses pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
--	--	--	--	---

KAJIAN TEORITIS

Dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini, sejumlah metodologi dapat digunakan dalam pengujian teoritis atas fungsi posisi akuntansi keuangan daerah. Hipotesis berikut dapat diterapkan pada situasi ini:

1. Akuntansi Sektor Publik

Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan merupakan tahap pertama dari akuntansi sektor publik, yang merupakan aktivitas manajerial yang menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan (Mahsun, 2014). Sistematika pelaporan akuntansi sektor publik harus dipahami oleh penyusun laporan keuangan sehingga pemakai laporan dapat memahami maknanya, yang meliputi keseimbangan antar generasi, akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Laporan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang transparansi dana yang telah didistribusikan ke berbagai entitas sektor publik.

2. Sistem Akuntansi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang membentuk suatu totalitas. Menurut definisi ini, sebuah sistem terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Yulianita Rochmana Pratiwi, 2021). Sistem terdiri dari dua atau lebih bagian yang saling berhubungan, atau sub-sistem yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Kata “sistem” berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau konstituen yang digabungkan untuk memungkinkan terjadinya perpindahan data, materi, atau energi (Saragih & Harahap, 2022).

3. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Manfaat pelaporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan waktu pelaporan keuangan, kelengkapan informasi, penyajian yang jujur, dapat diverifikasi isi laporan, daya banding isi laporan, serta keakuratan dan kejelasan informasi yang disampaikan merupakan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan (Darwanis dkk., 2016:60).

4. Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala sesuatu berupa kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut (UU No. 17 Tahun 2003) dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola semua masalah keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dasar-dasar pengelolaan keuangan daerah (1) Akuntabilitas; (2) Keterbukaan atau Transparansi; dan (3) Value for Money, yang mencakup keterjangkauan, efektivitas, dan efisiensi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur berbentuk pendekatan kualitatif. Jika dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, akan tetapi jika dilihat dari penjelasannya, penelitian ini menggunakan strategi studi literatur. Sugiyono (2017) mendefinisikan studi literatur sebagai proses pengumpulan beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian mengevaluasi dan meringkas data untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk memperoleh data, pencatatan keuangan daerah diperiksa untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam pelaporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, akuntansi keuangan daerah memainkan peran yang signifikan. Beberapa penelitian mengemukakan hal tersebut:

1. Peran Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

- a) Untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah perlu memprioritaskan peningkatan akuntansi keuangan daerah.
- b) Data keuangan yang diperlukan untuk penganggaran berbasis kinerja disediakan oleh akuntansi keuangan daerah.
- c) Laporan keuangan yang berkualitas tinggi dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan daerah yang handal. Kualitas laporan keuangan daerah juga dapat diperkuat dengan sistem akuntansi dan manajemen keuangan daerah yang sejalan.
- d) Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah difasilitasi oleh akuntansi keuangan daerah.
- e) Bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal di pemerintah daerah, akuntansi keuangan daerah bertindak sebagai sistem informasi keuangan, yang menyediakan statistik dan informasi keuangan.

- f) Dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada data dan informasi keuangan yang dihasilkan melalui akuntansi keuangan daerah.
- g) Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, keseluruhannya berpedoman pada akuntansi keuangan daerah.
- h) Dikarenakan pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya, alih-alih pada saat kas diterima atau dibayarkan, akuntansi keuangan daerah berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai situasi dan kinerja keuangan daerah.

2. Peran Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

- a) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang relevan, mencakup SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, wajib dicantumkan dalam Akuntansi Keuangan Daerah.
- b) Mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan diterapkannya Akuntansi Keuangan Daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c) Laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dengan berpedoman pada akuntansi keuangan daerah.

3. Penerapan akuntansi keuangan daerah terhadap pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

- a) Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah didorong dengan adanya akuntansi keuangan daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen keuangan daerah.
- b) Guna memfasilitasi pengambilan keputusan yang efisien, akuntansi keuangan daerah menyajikan data keuangan yang akurat dan tepat waktu.

- c) Badan pengawas seperti Inspektorat Daerah dan BPK dapat memperoleh data dan informasi keuangan yang diperlukan dari Akuntansi Keuangan Daerah.
- d) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, pihak-pihak pengawas seperti Inspektorat Daerah, BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memiliki akses terhadap data dan informasi keuangan yang disediakan oleh akuntansi keuangan daerah.
- e) Landasan untuk menilai pencapaian keuangan pemerintah daerah adalah data keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah.
- f) Kelalaian dalam menggunakan Akuntansi Keuangan Daerah dengan benar dapat menimbulkan temuan dalam laporan audit dan pemeriksaan, yang dapat menjadi landasan bagi tindakan korektif dan tindakan hukum oleh otoritas pengawas.

Selain itu terdapat komponen utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi yaitu memiliki sumber daya manusia. Beberapa penelitian mengemukakan hal tersebut:

- a) Kemampuan fisik merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, menurut (Lubatkin et al., 2007). Untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, pemerintah perlu menggunakan sumber daya yang dimiliki saat ini, termasuk teknologi informasi. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika suatu lembaga memiliki sumber daya manusia yang kompeten tetapi fasilitas yang tidak memadai. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai.
- b) Elemen utama di balik keberhasilan organisasi dalam menyediakan laporan yang akurat adalah departemen sumber daya manusia, yang juga merupakan bagian penting dari perusahaan.
- c) Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penggunaan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan keuangan daerah.
- d) Selain itu, dalam penelitian (Lilis et al., 2016) mengungkapkan bahwa fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, sebagai akibat dari fungsi audit internal

akan dapat mendampingi pemerintah dalam menyusun kualitas laporan keuangan pemerintah yang bermutu dan dapat diandalkan untuk menentukan kepastian data keuangan yang dihasilkan oleh SKPD.

Dimulai dari penyediaan informasi keuangan melalui penyusunan anggaran, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengendalian, akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tercapainya keterbukaan, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh penerapan Akuntansi Keuangan Daerah yang layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan sangat dipengaruhi oleh akuntansi keuangan daerah. Menurut penelitian ini, akuntansi keuangan daerah mendukung sejumlah faktor krusial, seperti: Meningkatkan kinerja keuangan daerah, meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong penerapan SAP, meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Adapun salah satu syarat untuk menerima nilai akhir ujian semester adalah menyelesaikan tugas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2): 212-232.
- Anto, L. O. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika.

- Atika, D., Junaidi, L. D., & Irmadhani, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Warta Dharmawangsa*, 13(4).
- Darmawan, A. Z., Harmain, H., & Syahriza, R. (2023). Peranan Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dalam Mendukung Pengendalian Internal Kas Pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 295-305.
- Dewi, A. & Ari, K. W. (2020). Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Kerangka Regulasi Keuangan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik Indonesia*, 15(3): 234-248.
- Dwi, S. (2020). Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Negara*, 24(1): 1-12.
- Eny, S. & Ayuningsih, D. F. (2019). Peran Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mendukung Tata Kelola Keuangan Daerah di Era Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2): 134-146.
- Fadillah, A., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (sakd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (skpd) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019). *eProceedings of Management*, 6(3).
- Hendri, M. & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1): 2479-2493.
- Ikyarti, T. & Aprila, N. (2019). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA. *Jurnal Akuntansi*, 9(2): 131-140.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2): 337-348.
- Jauhari, H. & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1): 104-121.
- Pratama, R. (2020). Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten X. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2): 123-136.
- Rima, H., Dedi, P., & Yossi, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 17(1): 87-104.

- Siti, K. R., & Umi, P. (2022). Peran Penting Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mendukung Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 11(2): 123-138.
- Ternalemta, T., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(1): 38-50.
- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Wardhani, M. & Setiawan, A. (2023). Desain Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 17(1): 1-18.
- Wulandari, N. D. (2021). Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor kecamatan Kota Medan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1): 128-137.
- Wulandary, A. & Rini, T. H. C. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2): 45-57.